

## ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019-2022

**Kekieta Gustie Berizky<sup>1</sup>; Rudi Kurniawan<sup>2</sup>**

Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro,  
Semarang<sup>1,2</sup>

Email : kekieta.gustie@gmail.com<sup>1</sup>; rudi.udinus@gmail.com<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Berdasarkan masalah pokok yang ada di temukan yaitu bagaimana kinerja keuangan Provinsi Jawa Tengah terhadap tingkat kemandirian dan tingkat ketergantungan provinsi Jawa tengah atas bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan Tidak hanya itu penelitian ini di buat juga mendapati karena adanya kebutuhan untuk optimalisasi dana daerah yang harus di optimalkan penggunaannya. Jadi maksud penelitian ini ialah bermaksud guna menganalisis kinerja keuangan pada Provinsis Jawa Tengah selama empat tahun terahir (2019-2022).Penelitian ini menggunakan Pendekatan Teknik analisis data deskriptif kuantitatif yaitu dengan cara melakukan perhitungan perhitungan terhadap data keuangan yang di peroleh guna mengetahui dan menyelesaikan masalah yang ada sesuai dengan maksud penelitian. dimana variable Y yaitu kinerja keuangan Provinsi Jawa Tengah dimana kinerja keuangan pemerintah provinsi jawa Tengah dalam mengelola keuangannya seccra efektif, efisien, akuntabel, dan tranparan. Kinerja keuangan yang ada di variable Y akan di ukur dengan beberapa variabel X yaitu rasio- rasio yang dipakai untuk mengukur kinerja keuangan Provinsi Jawa Tengah yaitu rasio kemandirian keuangan, rasio efektifitas PAD, rasio efisiensi, Rasio keserasian.

Kata kunci : Kinerja Keuangan Pemerintahan; Analisis Kinerja Keuangan; Analisi Rasio Keuangan

### ABSTRACT

*Based on the main problems found, namely how the financial performance of Central Java Province on the level of independence and the level of dependence of Central Java province on financial assistance from the central government and not only that this research was also made because of the need to optimise regional funds that must be optimised for use. So the purpose of this study is to analyse the financial performance of Central Java Province for the last four years (2019-2022). This study uses a quantitative descriptive data analysis technique approach, namely by performing calculations on the financial data obtained in order to find out and solve existing problems in accordance with the research objectives. where variable Y is the financial performance of Central Java Province where the financial performance of the Central Java provincial government in managing its finances is effective, efficient, accountable, and transparent. The financial performance in variable Y will be measured by several X variables, namely the ratios used to measure the financial performance of Central Java Province, namely the financial independence ratio, the PAD effectiveness ratio, the efficiency ratio, the compatibility ratio.*

*Keywords : Government Financial Performance; Financial Performance Analysis; Financial Ratio Analysis*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Penelitian

Otonomi daerah adalah suatu konsep dalam sistem pemerintahan di suatu negara di mana daerah atau wilayah tertentu diberikan otonomi atau kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri Sesuai dengan kebijakan serta norma-norma yang tengah berlaku. di tingkat nasional. Otonomi daerah diharapkan agar mengarah ke terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan melalui peningkatan pelayanan yang ada di Tengah masyarakat kemudian pemberdayaan dan peran seta masyarakat (Purwanti & Noviyanti, 2022). Kemudian pada saat wawancara dengan bagian perencanaan di sebuah instansi pemerintahan dengan salah satu sub koordinator dan kelompok jabatan fungsional mendapati adanya kebutuhan yaitu solusi dari penggunaan dana daerah yang kurang optimal, sehingga dapat di artikan adanya perlunya optimalisasi penggunaan dana daerah dalam analisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini mencakup analisis kinerja keuangan dari segi efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi, serta tingkat kemandirian dan ketergantungan keuangan terhadap bantuan pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan praktis optimalisasi pemanfaatan dana daerah dan penilaian kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jawa TengahBerlatar belakang dari itu, peneliti mengkaji bagaimana kinerja pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini memiliki daya guna yang signifikan dalam memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang relevan untuk merumuskan keputusan dalam mengelola keuangan negara. Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan yang lebih baik tentang kemandirian keuangan, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi penggunaan anggaran, dan keserasian dalam pengalokasian anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Retribusi dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi untuk Para perencana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, mempertahankan tingkat kemandirian keuangan, dan meningkatkan efektivitas serta alokasi belanja modal. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam mengambil langkah-langkah yang lebih tepat dalam pengelolaan keuangan daerah untuk

pembangunan yang berkelanjutan. Dengan menggunakan metode yang diadopsi dalam penelitian ini ialah dengan metode analisis rasio.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Analisis Rasio Keuangan

Analisis keuangan merupakan satu dari alat yang penting guna membantu pemerintah saat mengelola keuangan di suatu negara. Dengan melakukan evaluasi finansial, pemerintah dapat memperoleh data yang esensial untuk merumuskan keputusan yang lebih akurat dalam mengelola keuangan negara. Informasi yang ada pada laporan keuangan pemerintah pastinya harus relevan guna menggapai tujuan laporan keuangan pemerintah, kendati demikian, tidak dapat terpenuhi secara menyeluruh.. satu dari bagian metode yang bisa di gunakan dalam menganalisa laporan keuangan yakni melalui perhitungan rasio keuangan. Angka rasio keuangan dapat diperoleh melalui perbandingan antara suatu entitas dalam laporan keuangan dengan entitas lainnya. (Awani & Hariani, 2021). Informasi pendukung, juga bagian laporan non keuangan, bisa dilaporkan bersamaan dengan laporan keuangan guna menambah gambaran yang lebih komprehensif tentang kegiatan suatu entitas pelaporan sepanjang rentang satu periode (Mulia, 2019). Pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan melalui analisis rasio keuangan terhadap pencapaian anggaran pemerintah daerah, yang merupakan salah satu parameter penting dalam kerangka evaluasi. Dalam konteks analisis kinerja keuangan daerah, terdapat beragam rasio yang dapat diaplikasikan sebagai instrumen evaluasi. diantaranya adalah Rasio kemandirian, rasio efektifitas pad, rasio efisiensi, rasio keserasihan (Rahmadani & Rudini, 2023).

#### Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian ini biasanya di gunakan untuk mengukur kemampuan pemerintahan daerah untuk mengukur kemampuan sebuah instansi pemerintahan dalam membiayai aktivitas yang sudah di susun untuk Pembangunan suatu daerah, pengembangan ekonomi, kesejahteraan Masyarakat. Rasio ini di hitung dengan cara mengukur pendapatan asli daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah (Mahmudi, 2019).

Mengacu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.07/2016 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, rasio kemandirian dibagi menjadi tiga kategori, yaitu bisa di lihat pada tabel 1.

### **Rasio Efektifitas PAD**

Rasio efektifitas PAD merupakan indikator kemempuana pemerintah dalam mentecak pendapatan pendapatan asli daerah (PAD) yang sudah di rencanakan dengan mengumpulkan PAD dari target /potensi riilnya, PAD target adalah pendapatan asli daerah yang di tetapkan pada anggran pemasukan dan belajna daerah (APBD) pada pirode tertentu. rasio ini digunakan untuk menilai kinerja pemerintahan dalam mengelola PAD nya. Dalam rasio efektifitas PAD ini dapat di artikan dengan bertambah banyak nilai rasio efektifitas PAD, mengartikan bertambah baik kinerja pemerintahan daerah dalam mengelola PAD (Sampow & Pangkey, 2022).

Dalam perhitunganya Rasio Efektivitas PAD = PAD Realisasi / PAD Target dengan keterangan PAD Realisasi adalah pendapatan asli daerah yang sudah terwujud pada periode yang ditetapkan sedangkan PAD Target merupakan pemasukan sebenarnya daerah yang teratur dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada periode tertentu. Indikator rasio efektifitas bisa di lihat pada tabel 2.

### **Rasio Efisiensi**

Dalam instansi pemerintahan rasio efisiensi di gunakan untuk mengukur seberapa baik instansi pemerintahan menggunakan sumber dayanya. Di dalam pemerintahan rasio efisiensi ini di gunakan untuk menilai kinerja instansi pemerintahan dalam hal oprasional, manajemen aset, dan masihbanyak yang lainnya. Kinerja pemerintahan saat dalam pengambilan pendapatan dapat di kategorikan efisien jika rasio yang tidak melampaui atau masih kurang 100% (Susanto, 2019). Dalam rasio efisiensi indikatornya bisa di lihat pada tabel 3.

Rasio efisiensi dapat mencerminkan antara anggran belaja dengan terwujudnya yang di perolaeh pada tahun anggran berjalan. Unturan dari rasio ini dapat di kelompokkan kedalam beberapa klasifikasi yang bisa di lihat di Tabel 3 yang ada di atas (Karina & Wibowo, 2022).

### **Rasio Keserasian**

Rasio keserasian belanja dapat menunjukan bagaimana pemerintah daerah dalam mengalokasikan pendanaan pada belanja kegiatan serta belanja modal secara ideal (Wulandari dkk., 2023). Dalam hal rasio keserasianini tidak ada acuan idel yang mengenai besarnya rasio belanja terhdap total belajan APBD sebab dalam konteks yang sangat berdampak pada dinamika pembangunan dan kebutuhan investasi, pentingnya

penyediaan infrastruktur ekonomi masyarakat menjadi krusial untuk mencapai peningkatan yang telah ditargetkan. Maka dari menurut (Karina & Wibowo, 2022) Rasio keserasian yang lebih rendah mencerminkan peningkatan alokasi anggaran, khususnya penekanan pada kegiatan yang secara langsung terkait dengan inisiatif dan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Semakin kecil rasio ini, semakin optimalnya pengalokasian dana yang diinginkan. Untuk indikator rasio keserasian bisa di lihat ke dalam tabel 4.

### **Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merujuk pada interrelasi atau keterhubungan antara berbagai konsep yang relevan dalam konteks penelitian tertentu. Pembentukan kerangka konseptual ini melibatkan integrasi konsep-konsep ilmiah atau teoretis yang digunakan sebagai dasar penelitian. Guna memperjelas konsep-konsep dan mengarahkan penelitian, peneliti merancang kerangka konseptual Yang bisa di lihat pada gambar 1.

### **Definisi Oprasional**

Dalam definisi oprasional variable yang ada di dalam penelitian adalah meliputi variable Y yaitu kinerja keuangan Provinsi Jawa Tengah dimana kinerja keuangan pemerintah provinsi jawa Tengah dalam mengelola keuangannya seccra efektif, efisien, akuntabel, dan tranparan. Kinerja keuangan yang ada di variable Y akan di ukur dengan beberapa variabel X yaitu rasio kemandirian keuangan, rasio efektifitas PAD, rasio efisiensi, Rasio keserasian. penelitian menggunakan rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan Provinsi Jawa Tengah karena rasio rasio tersebut telah di akui secara luas sebgai alat untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dan Rasio-rasio tersebut telah digunakan dalam berbagai penelitian dan studi tentang kinerja keuangan pemerintah daerah (Mahmudi 2019).

### **Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian (Rahmadani & Rudini, 2023) rasio kemandirian dapat di lihat bahwa kemandirian keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur menunjukkan selama 4 tahundapat menunjukan pola instruktif dengan interval nilai antara 0%-25% dimana pemerintah kotawaringin masih Sangat bergantung pada pemerintah pusaat atau pusat provinsi. Pemerintah Daerah dapat melakukan optimalisasi kontribusi BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) guna untuk meningkatkan PAD sehingga ketergantungan pendapatan dari pemerintah pusat bisa berkurang.

Penelitian (Wulandari dkk., 2023) Meskipun mengalami fluktuasi menunjukkan rasio efektifitas pada kinerja keuangan kota Mataram mampu dalam merealisasikan PAD melebihi yang di anggarakan setiap tahunnya. maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Mataram berada pada kriteria efektif. Artinya bahwa Pemerintah Kota Mataram mampu dalam merealisasikan PAD melebihi yang dianggarkan setiap tahun. Hal ini dikarenakan sumber-sumber PAD seperti Pajak Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD Yang Sah selalu memperoleh realisasi melebihi yang telah dianggarkan.

Penelitian (Susanto, 2019) mengacu temuan perhitungannya rasio efisiensi Pemerintah Daerah Kota Mataram tahun anggaran 2012-2015 dapat indikasikan belum efisien sebab taraf rata-rata pencapaian efisiensi sebesar 99,12%. Keberhasilan ini mungkin mencerminkan kurangnya efisiensi dalam kinerja pemerintah selama proses pengumpulan Penerimaan Asli Daerah (PAD), yang termanifestasi melalui tren rasio di bawah 100%. Hal ini menyiratkan bahwa untuk mencapai hasil optimal, pemerintah daerah harus mengeluarkan investasi finansial yang substansial.

Penelitian (Karina & Wibowo, 2022) menunjukkan rasio keserasian yang ada di Pemerintah Daerah Kota Semarang dapat di nyatakan cukup baik sebab pengadaaan prioritas belanja modal dalam pembangunan kotanya, dimana anggaran belanja semakin banyak alihkan kegiatan terkait secara langsung dengan program-program yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

### METODE PENELITIAN

Metode yang akan di gunakan pada penelitian ialah Teknik analisis data deskriptif kuantitatif yaitu dengan cara melakukan perhitungan terhadap data keuangan yang di peroleh guna mengetahui dan memecahkan masalah masalah yang ada sejalan dengan maksud penelitian.

#### 1) Rasio Kemandirian Keuangan

Rasio ini akan mengukur kemampuan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah untuk membiayai pembangunan secara independen, tanpa bersandar pada dana perimbangan dari pemerintah utama. Rasio kemandirian dapat di hitung dengan menggunakan rumus

*Rasio kemandirian Keuangan* =  $\left( \frac{PAD}{(PAD + Dana\ perimbangan)} \right) \times 100\%$  (Putri & Munandar, 2021).

## 2) Rasio Efektifitas PAD

Rasio efektifitas PAD ini akan mengukur kemampuan pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat menggapai target pemasukan asli daerahnya. Dalam operasionalnya rasio Efektifitas PAD dapat di hitung menggunakan rumus

$$\text{Rasio Eektifitas PAD} = \left( \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \right) \times 100\% \text{ (Marliani, 2022).}$$

## 3) Rasio Efisiensi

Dalam rasio efisiensi rasio ini mengukur kemampuan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menggunakan anggarannya secara tepat sasaran dan tepat waktu. Rasio efisiensi dapat di hitung menggunakan rumus

$$\text{Rasio Efisiensi} = \left( \frac{\text{Belanja Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \right) \times 100\% \text{ (Marliani, 2022)}$$

## 4) Rasio Keserasihan

Rasio keserasihan akan mengukur kemampuan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengalokasikan anggarannya untuk Pembangunan Infrastruktur. rasio keselarasan ini dapat di hitung dengan rumus

$$\text{Rasio Keserasihan} = \left( \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \right) \times 100\% \text{ (Wulandari dkk., 2023).}$$

## 5) Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan yang dimaksud di sini merujuk pada tingkat prestasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Ini mencakup pencapaian anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan menerapkan indikator keuangan yang telah ditetapkan sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Pengukuran kinerja ini diwujudkan dalam bentuk rasio keuangan. (Harjito dkk., 2020).

# HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

## Rasio Kemandirian Keuangan

Temuan dari perhitungan olah data Rasio kemandirian keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Anggaran 2019-2022 yang bisa di lihat pada tabel 5.

Berdasarkan tabel 5 temuan kalkulasi dari dari rasio kemandirian keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah tercermin bahwa selama 4 Tahun berada di tingkatan rata-rata 144% sehingga dapat di kategorikan memiliki kemandirian yang tinggi. Dalam kondisis seperti ini dapat menunjukan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat kemandirian yang sangat tinggi karena menunjukan indikator >70% yaitu mencapai 144%.

Pemerintah provinsi Jawa Tengah bisa dikatakan mandiri secara finansial. Hal ini berarti bahwa pemerintah provinsi Jawa Tengah mampu membiayai pembangunan daerahnya secara mandiri, tanpa terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Tingkat kemandirian keuangan yang tinggi ini tentu merupakan kabar baik bagi masyarakat Jawa Tengah. Hal ini berarti bahwa pemerintah provinsi Jawa Tengah memiliki lebih banyak sumber daya untuk membiayai pembangunan daerah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **Rasio Efektifitas PAD**

Hasil dari perhitungan rasio efektifitas PAD Provinsi Jawa Tengah Anggaran 2019-2022 bisa di lihat di dalam tabel 6.

Pada table 6 menunjukkan indikator rasio efektifitas Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu anggaran, terdapat pencapaian yang konsisten dengan tingkat keberhasilan rata-rata sekitar 99%, menunjukkan kualitas yang tinggi dan konsistensi dalam hasil 2019-2022. Dengan melihat table 6 dapat diketahui pula bahwa Efektifitas PAD Keuangan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 sangat efektif karena nilai rasio yang di peroleh >100% yaitu pada nilai 100%, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 96% akantetapi masih tergolong kedalam kategori efektif dimana presentasi kinerjanya beradi di 90%-100% dan untuk tahun2021 mengakami kenaikan di angkat 98% dimana maih termasuk kedalam kategori efektif, kemudian di tahun 2022 mengalami kenaikan kemabli di angka 101% yang berarti presentase kinerja keuanganya sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahawa Provinsi Jawa Tengah dapat mengoptimalkan penggunaan PAD yang diharapkan setiap tahunnya.

Berdasarkan pernyataan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat dikatakan efektif dalam mengelola pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini terlihat dari rasio efektifitas PAD yang selalu berada di atas 90%, bahkan mencapai 100% pada tahun 2019 dan 2022. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berhasil mengoptimalkan penggunaan PAD untuk memenuhi target-target pembangunan daerah. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata rasio efektifitas PAD yang mencapai 99% dalam kurun waktu 2019-2022.

### **Rasio Efisiensi**

Hasil temuan dari kalkulasi rasio efisiensi keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah Anggaran 2019-2022 yang bisa di lihat dalam tabel 7.

Dapat di lihat pada tabel 7 Pada tahun 2019 rasio efisiensi keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah tergolong tidak efisien dikarenakan rasionya menunjukkan angka diatas 100% yaitu menunjukkan pada angka 128%, lalu pada tahun berikutnya tahun 2020 dan 2021 juga masih mengalami peningkatan di akngka 139% di tahun 2020 dan 176% pada tahun 2021, pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 147% akantetapi masih tergolong kedalam kategori tidak efisien sebab rasio efeisiensinya melampaui 100%. Hal ini menunjukan bahawa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah tidak cermat dalam menentukan berapa besar biaya yang di gunakan unutuuk merealisasikan pendapatanya di tahun 2019-2022 Karena tidak efisiennya penggunaan keuangan.

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat dikatakan tidak efisien dalam pengelolaan keuangannya. Hal ini ditunjukkan oleh rasio efisiensi keuangan daerah yang selalu berada di atas 100% dalam periode 2019-2022. Maka perencanaan anggaran merupakan langkah awal yang penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Perencanaan anggaran yang baik akan membantu pemerintah daerah untuk menentukan kebutuhan yang sebenarnya dan kemampuan keuangan daerah.

#### Rasio Keserasihan

Hasil dari perhitungan Rasio Keserasihan Keunagan Daerah Provinsi Jawa Tengah Anggaran 2019-2022 yang bisa di lihat di dalam tabel 8 dan 9.

Berdasarkan analisis terhadap Tabel 9 mengenai rasio aktivitas pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah pada subkomponen belanja operasional, dapat disimpulkan bahwa tingkat rata-rata mencapai 74%, sementara pada subkomponen belanja modal, tingkat rata-ratanya hanya sebesar 8%. Hal ini mengindikasikan bahwa proporsi belanja operasional jauh lebih tinggi dibandingkan dengan belanja modal. Situasi ini mencerminkan kecenderungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk mengalokasikan sebagian besar dana pada kegiatan operasional. Tingginya alokasi pada belanja operasional tersebut mengakibatkan penurunan signifikan dalam porsi alokasi belanja modal, yang seharusnya diarahkan untuk penyediaan sarana prasarana ekonomi masyarakat dan pelayanan publik.

Dari hasil pernyataan di atas maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu melakukan evaluasi terhadap prioritas belanjanya. Tingginya alokasi belanja operasional mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah lebih

fokus pada kegiatan rutin, seperti pembayaran gaji pegawai, belanja barang dan jasa, serta bunga hutang. Hal ini tentu penting untuk dilakukan, namun perlu diimbangi dengan alokasi belanja modal yang memadai. Selain itu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu meningkatkan efisiensi belanja operasional. Dengan meningkatkan efisiensi belanja operasional, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk belanja modal.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan Hasil perhitungan dari rasio-rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah selama tahun anggaran 2019-2022 maka di peroleh hasil sebagai berikut :

1. Rasio Kemandirian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019-2022 dikategorikan sangat tinggi karena sangat tinggi karena menunjukkan indikator  $>70\%$  yaitu mencapai  $144\%$ . sehingga dapat di artikan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah tidak mempunyai taraf kecendernuangan bersandar pada Pemerintah Pusat.
2. Rasio Efektifitas PAD Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019-2022 dapat di kategorikan menunjukkan indikator rasio efektifitas Provinsi Jawa Tengah yang cukup memuaskan dengan temuan rata rata  $99\%$  rentang waktu anggaran 2019-2022. Selain itu dengan hasil rata-rata efektifitas PAD mencapai  $99\%$  maka hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah dapat mengoptimalkan penggunaan PAD yang diharapkan setiap tahunnya.
3. Rasio Efisiensi pada kinerja keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019-2022 dikategorikan tidak efisien karena persentasenya di atas  $100\%$  dengan rata-rata persentasenya yaitu  $147\%$ . hal ini mengabarkan bahwa persentase tingkat penovpaian Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Mengalokasikan anggaran yang lebih tinggi untuk mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menciptakan hasil yang menunjukkan bahwa efisiensi pengelolaan keuangan daerah masih belum mencapai tingkat optimal.
4. Rasio Keserasihan pada Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019-2022 mengacu evaluasi aktivitas pengelolaan keuangan daerah, terlihat bahwa tingkat efisiensi masih rendah. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah cenderung

memberikan prioritas lebih tinggi pada alokasi Belanja Operasi, mencapai tingkat rata-rata sebesar 74%, sementara Belanja Modal hanya mencapai tingkat rata-rata 8%..

#### SARAN

1. Diharapkan dapat mempertahankan tingkat Kemandirian yang di kategorikan sangat tinggi sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki tingkat ketergantungan pada Pemerintah Pusat. Dalam peningkatan pendapatan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat dengan cara meningkatkan potensi retribusi daerah dan potensi pajak daerah.
2. Mempertahankan tingkat Efektifitas Provinsi Jawa Tengah yang cukup baik dengan hasil rata rata 99 % selama kurun waktu anggaran 2019-2022. sehingga menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah dapat mengoptimalkan penggunaan PAD yang diharapkan setiap tahunnya. Efektifitas pengelolaan PAD Provinsi Jawa Tengah dapat di lakukan dengan cara melakukan perencanaan dan penggaran PAD yang realistis dan terukur, kemudian melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran PAD.
3. Optimalisasi dapat di lakukan untuk peningkatan efisiensi dalam kinerja keuangan karena dikategorikan tidak efisien karena peresentasenya di atas 100% dengan rata-rata persentasenya yaitu 147%. Dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat melakukan penghematan dalam penggunaan anggaran dengan mekakukan revisi anggran secra berkala, mengurangi kegiatan yang tidak penting, meningkatkan efektifitas dan efisiensi dengan pelaksanaan kegiatan dengan melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran.
4. Menambah alokasi Belanja Modal yang berkaitan dengan pengadaan sarana prasarana ekonomi serta pelayanan publik supaya bisa lebih memperbaiki kesejahteraan masyarakat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Alokasi belanja modal dapat di lakukan dengan menyusun rencana sekala prioritas pembangunan infrastruktur dan pengadaan barang modal, memanfaatkan teknologi informasi yang baik dalam pembangunan infrastruktur.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Awani, M. F., & Hariani, S. (2021). Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 95–102. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i2.158>

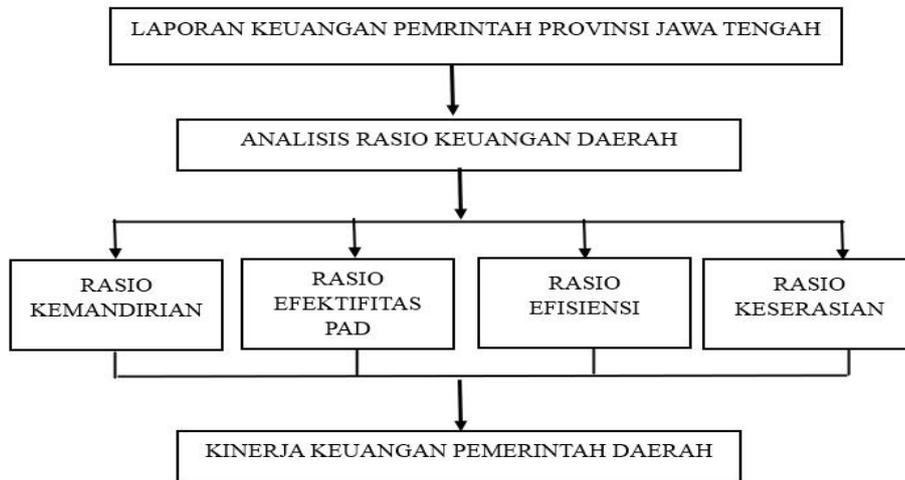
- Harjito, Y., Nugraha, P. S., & Yulianto, Y. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Indonesia. *JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI)*, 5(1), 19–28. <https://doi.org/10.29407/jae.v5i1.14061>
- Karina, N. N., & Wibowo, P. (2022). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi*, 14(2), 146–166. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v14i2.4512>
- Marliani, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi)*, 14(1), 11–20. <https://doi.org/10.37151/jsma.v14i1.84>
- Mulia, R. A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal EL-RİYASAH*, 9(1), 7. <https://doi.org/10.24014/jel.v9i1.6798>
- Purwanti, E., & Noviyanti, E. (2022). ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2014-2018. *Among Makarti*, 14(2). <https://doi.org/10.52353/ama.v14i2.213>
- Putri, R., & Munandar, A. (2021). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 5(3), 2296-2313. <https://doi.org/10.31955/mea.v5i3.1684>
- Rahmadani, R., & Rudini, A. (2023). *ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018-2020*.
- Sampow, R., & Pangkey, R. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Value For Money Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bitung. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 261–271. <https://doi.org/10.53682/jaim.v3i2.2755>
- Susanto, H. (2019). ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MATARAM. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 7(1), 81–92. <https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67>
- Wulandari, R., Lestari, B. A. H., & Suryantara, A. B. (2023). ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MATARAM. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(2), 56–69. <https://doi.org/10.29303/risma.v3i2.657>
- Mahmudi. (2019). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Yogyakarta: STIM YKPN

## GAMBAR, GRAFIK DAN TABEL

Tabel 1 Standar Akuntansi Rasio Kemandirian

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Kemandirian Tinggi | >70%    |
| Kemandirian sedang | 50%-70% |
| Kemandirian rendah | <50%    |

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.07/2016



Gambar 1 kerangka Konseptual  
 Sumber : Data di olah 2023

Tabel 2 Indikator Rasio Efektifitas

| Presentase Kinerja keuangan | Kriteria       |
|-----------------------------|----------------|
| Diatas 100%                 | Sangat Efektif |
| 90%-100%                    | Efektif        |
| 80%-90%                     | Cukup efektif  |
| 60%-80%                     | Kurang efektif |
| Kurang dari 60%             | Tidak efektif  |

Sumber : (Susanto, 2019)

Tabel 3 Indikator Rasio Efisiensi

| Kriteria Efisiensi | Presentase Kinerja Keuangan |
|--------------------|-----------------------------|
| Tidak efisien      | >100%                       |
| Kurang efisien     | 90%-100%                    |
| Cukup efisien      | 80%-90%                     |
| Efisien            | 60%-80%                     |
| Tidak efisien      | <60%                        |

Sumber : (Rahmadani & Rudini, 2023)

Tabel 3 Indikator Rasio Efisiensi

| Kriteria Efisiensi | Presentase Kinerja Keuangan |
|--------------------|-----------------------------|
| Tidak efisien      | >100%                       |
| Kurang efisien     | 90%-100%                    |
| Cukup efisien      | 80%-90%                     |
| Efisien            | 60%-80%                     |
| Tidak efisien      | <60%                        |

Sumber : (Rahmadani & Rudini, 2023)

Tabel 4 Indikator Rasio Kekeragaman

|   |                  |
|---|------------------|
| Jumlah Belanja Operasi > Jumlah Belanja Modal | Kurang Baik      |
| Jumlah Belanja Operasi = Jumlah Belanja Modal | Cukup Baik       |
| Jumlah Belanja Operasi < Jumlah Belanja Modal | Baik-Sangat Baik |

Sumber : (Wulandari dkk., 2023)

Tabel 4 Indikator Rasio Keserasian

|   |                  |
|---|------------------|
| Jumlah Belanja Operasi > Jumlah Belanja Modal | Kurang Baik      |
| Jumlah Belanja Operasi = Jumlah Belanja Modal | Cukup Baik       |
| Jumlah Belanja Operasi < Jumlah Belanja Modal | Baik-Sangat Baik |

Sumber : (Wulandari dkk., 2023)

Tabel 5 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

| Tahun Anggaran | Pendapatan Asli Daerah | Total Bantuan Pemerintah Pusat | KKD % | Kemandirian        |
|----------------|------------------------|--------------------------------|-------|--------------------|
| 2019           | 14.488.333.544.000     | 11.766.733.523.000             | 123   | Kemandirian Tinggi |
| 2020           | 14.267.084.822.000     | 11.964.515.081.000             | 119   | Kemandirian Tinggi |
| 2021           | 15.017.805.787.000     | 11.713.752.634.000             | 128   | Kemandirian Tinggi |
| 2022           | 16.141.754.406.000     | 7.894.603.950.000              | 204   | Kemandirian Tinggi |
| Rata-rata      |                        |                                | 144   | Kemandirian Tinggi |

Sumber : Data BPKAD di olah 2023

Tabel 6 Rasio Edektifitas Pendapatan Asli Daerah

| Tahun Anggaran | Realisasi PAD      | Target Penerimaan PAD Berdasarkan Potensi Riil | EPAD % | Efektifitas    |
|----------------|--------------------|--|--------|----------------|
| 2019           | 14.437.914.236.398 | 14.488.333.544.000                             | 100    | Sangat Efektif |
| 2020           | 13.668.282.278.855 | 14.267.084.822.000                             | 96     | Efektif        |
| 2021           | 14.695.474.898.162 | 15.017.805.787.000                             | 98     | Efektif        |
| 2022           | 16.264.618.853.852 | 16.141.754.406.000                             | 101    | Sangat Efektif |
| Rata-rata      |                    |  | 99     | Efektif        |

Sumber : Data BPKAD di olah 2023

Tabel 7 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

| Tahun Anggaran | Realisasi Belanja Daerah | Realisasi PAD      | EKD % | Efisiensi     |
|----------------|--------------------------|--------------------|-------|---------------|
| 2019           | 18.456.935.979.539       | 14.437.914.236.398 | 128   | Tidak Efisien |
| 2020           | 19.004.867.768.862       | 13.668.282.278.855 | 139   | Tidak Efisien |
| 2021           | 25.843.800.193.834       | 14.695.474.898.162 | 176   | Tidak Efisien |
| 2022           | 23.950.240.497.405       | 16.264.618.853.852 | 147   | Tidak Efisien |
| Rata-rata      |                          |                    | 147   | Tidak Efisien |

Sumber : Data BPKAD di olah 2023

Tabel 8 Rasio Belanja Oprasi

| Tahun Anggaran | Total Belanja Operasi | Total Belanja Daerah | RBO % |
|----------------|-----------------------|----------------------|-------|
| 2019           | 17.260.946.154.000    | 19.665.066.328.000   | 88    |
| 2020           | 16.913.391.556.000    | 19.805.169.149.000   | 85    |
| 2021           | 17.767.668.233.000    | 27.444.625.233.000   | 65    |
| 2022           | 14.233.669.493.000    | 23.950.240.497.405   | 59    |
| Rata-rata      |                       |                      | 74    |

Sumber : Data BPKAD di olah 2023

Tabel 9 Rasio Belanja Modal

| Tahun Anggaran | Total Belanja Modal | Total Belanja      | RBM % |
|----------------|---------------------|--------------------|-------|
| 2019           | 2.381.120.174.000   | 19.665.066.328.000 | 12    |
| 2020           | 1.057.533.752.000   | 19.805.169.149.000 | 5     |
| 2021           | 1.543.430.155.000   | 27.444.625.233.000 | 6     |
| 2022           | 2.015.151.410.000   | 23.950.240.497.405 | 8     |
| Rata-rata      |                     |                    | 8     |

Sumber : Data BPKAD di olah 2023